



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/ 29 /DPRD/2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi untuk dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis perlu mempertimbangkan, memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam satu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dengan Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

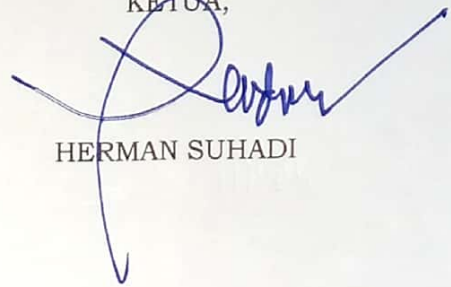
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 26 November 2021

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

HERMAN SUHADI

Lampiran  
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor 188.4/ /DPRD/2021  
Tentang  
Persetujuan Penetapan Program Pembentukan  
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung Tahun 2022

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DPRD PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TENTANG PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI.
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TENTANG PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

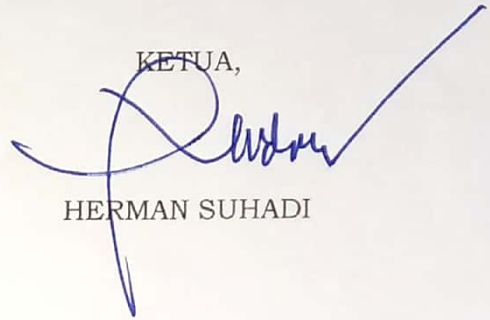
II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK.
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PENYANDANG CACAT.
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
REGIONAL.
5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG APBD TAHUN 2023.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2022.
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021.

KETUA,



HERMAN SUHADI

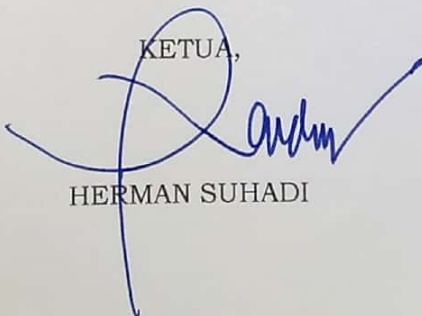
SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2022

| NO | JUDUL RANCANGAN PERDA                                                                                                                                                                                                                      | USULAN   | SKALA PRIORITAS | MASA SIDANG PEMBAHASAN            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN                                                                                                                                                   | DPRD     | 1               | Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II |
| 2. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI                                                                                                                                    | DPRD     | 2               | Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II |
| 3. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.                                                                                                                  | DPRD     | 3               | Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II |
| 4. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Gubernur | 4               | Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II |
| 5. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK                                                                                                                              | Gubernur | 5               | Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II |

|    |                                                                                                                                                                                                                    |          |   |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|
| 6. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT | Gubernur | 6 | Masa Sidang II s.d. Masa sidang III |
| 7. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL                                                                                                                  | Gubernur | 7 | Masa Sidang II s.d. Masa sidang III |
| 8. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                  | Gubernur | 8 | Masa Sidang II s.d. Masa sidang III |

| NO | DAFTAR RAPERDA KUMULATIF TERBUKA                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG APBD TAHUN 2023.                               |
| 2. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2022.                     |
| 3. | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021 |

KETUA,



HERMAN SUHADI